



SUARA LAUT

Volume 3 : Refleksi Keseharian

Menghidupi dan Memisahkan

Vol.3 Refleksi Keseharian : Menghidupi dan Memisahkan

Editor

Luthfian Haekal

Design & Layout

Muhamad Arif
Fairuz Mahdiyyah

Penulis

Dzulfiusi Rafif
Nabiyya Perennia
La Ode Hardiani
Muhammad Zidan Amin

Jl. Jaha No.88 ABC, East Cilandak, Pasar
Minggu, South Jakarta City, Jakarta 12560

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DARI PENGINTERUPSI LAUT: MENGHIDUPI SEKALIGUS MEMISAHKAN	1
SELAYANG PANDANG : DARI DATA DI LAUT HINGGA KEBIJAKAN DI MEJA RAPAT	3
PADA AWALNYA, SECERCAH HARAPAN DI SAMUDERA HINDIA	5
DI BALIK SETIAP NELAYAN HEBAT, ADA PEREMPUAN DENGAN BEBAN GANDA	9
OMBAK MUARA DI KONGSI UTARA: VISUALISASI KONDISI SOSIAL-EKONOMI DI TPI WONOKERTO	12
DESA YANG HILANG	16
BERITA KELAUTAN	17

KERJA PAKSA DAN PERDAGANGAN ORANG

Menghantui Pekerja Perikanan

Hubungi layanan pengaduan National Fishers Center jika mengalami hal tersebut

Telepon 0811-9214-141 & 0811-1437-575

Website www.nfc.or.id

E-mail nfc@dfw.or.id

Bergabung di website kami, dan dapatkan informasi terupdate seputar **pekerja perikanan**.

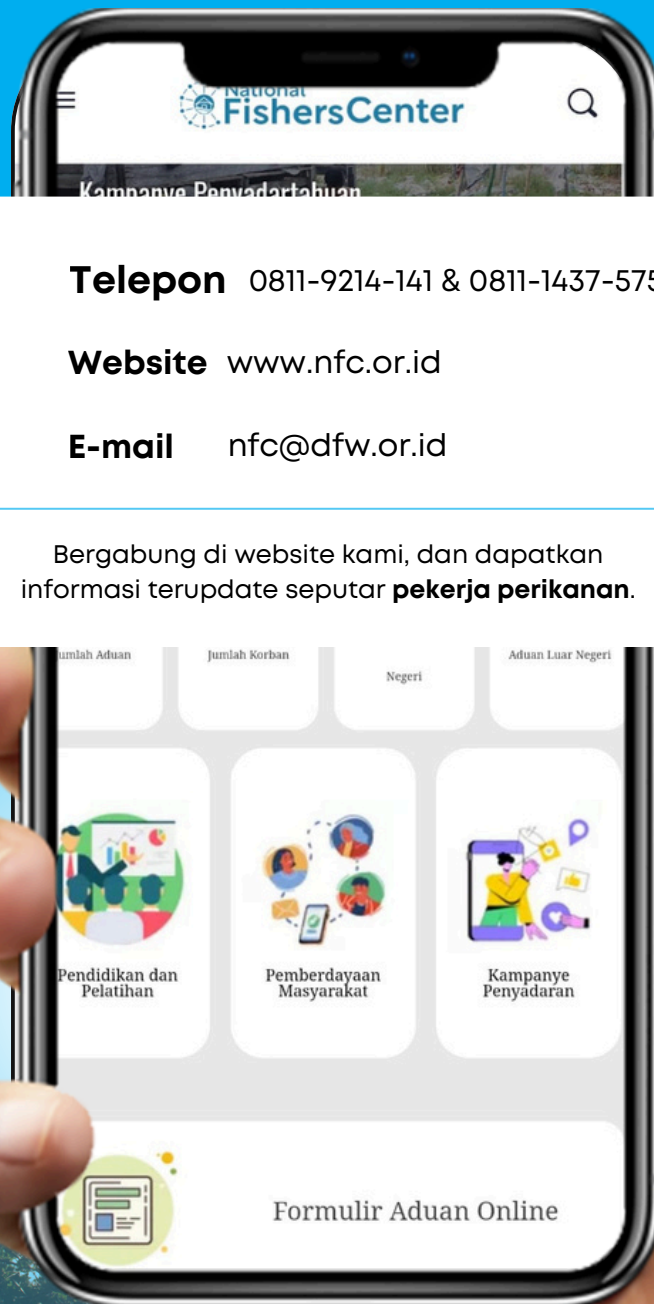




Foto: Fai / DFW Indonesia

Kata Pengantar dari Penginterupsi

Laut: Menghidupi Sekaligus Memisahkan



**Bagaimana
kehidupan
mereka
yang
ditinggalkan
melaut?"**

Pertanyaan sederhana tersebut menjadi salah satu pemantik Zine “Suara Laut” untuk terbit. Laut menyingkap berbagai paradoks, salah satunya, ia menghidupi, namun juga memisahkan. Laut bukan lah bentang alam, tetapi ruang produksi tempat kerja tenaga manusia yang terkomodifikasi dan direpresentasikan dalam grafik ekspor. Di balik grafik ekspor yang menanjak, pertumbuhan Produk Domestik Bruto dengan berbagai deretan angka statistik, terdapat kerja-kerja buruh perikanan tanpa henti. Kerja di laut tidak hanya melahirkan komoditas, tetapi juga memproduksi ketidakpastian yang menjadi fondasi bagi berjalannya ekonomi kelautan itu sendiri.

Tubuh-tubuh pekerja yang menopang ekonomi kelautan, menjadi simpul sirkuit global nilai lebih.

Sirkuit itu tidak hanya berhenti di laut dan dermaga, tetapi kerja perawatan dan reproduksi sosial yang dijalankan oleh perempuan pesisir. Laut, dalam konteks ini, berfungsi sebagai *offshore frontier* untuk meningkatkan perekonomian kelautan. Sementara, rumah menjadi *backshore frontier* bagi regenerasi tenaga kerja.

Zine “Suara Laut” yang diterbitkan oleh Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia berusaha untuk merekam apa yang terjadi di dalam ekonomi kelautan di Indonesia. Zine dihadirkan untuk menulis dari celah antara laut dan rumah, antara produksi dan reproduksi. Mengamini Burawoy (1985), produksi dan reproduksi sosial merupakan satu kesatuan. Reproduksi sosial bukan pelengkap, tetapi fondasi yang menopang tenaga kerja. Dalam kerja-kerja yang berhubungan dengan laut, suami meninggalkan istri dan anaknya di rumah.

Dalam terbitan ketiga, terdapat dua esai yang mencoba merangkum tema inti “laut: menghidupi sekaligus memisahkan”, satu foto esai tentang kehidupan di pelelangan ikan, dan satu karya refleksi dari warga pesisir tentang kehilangan ruang. Esai pertama dari Laode Hardiani yang membahas tentang sisi kehidupan di laut mengisahkan keseharian Awak Kapal Perikanan (AKP) selama berlayar. Setidaknya, dalam esai ini yang akan dibagi ke dalam dua bagian, Hardiani bercerita kisah AKP dari awal perekrutan sampai dengan kepulangannya. Hardiani menuliskan seorang suami yang harus meninggalkan keluarganya di rumah untuk melaut dengan harapan mengubah nasib, tetapi malah terjatuh dalam rantai utang, jam kerja ekstrem, dan ketiadaan perlindungan sosial.

Esai kedua dari Nabiyya mengisahkan kehidupan keluarga AKP yang ditinggal melaut oleh suami sebagai kepala keluarga. Bertempat di Wonokerto, perempuan memikul beban ganda; produksi sekaligus reproduksi untuk tetap memenuhi kebutuhan keseharian. Dalam esai tersebut, Nabiyya mengisahkan keluarga AKP yang terpisah oleh jarak, perempuan menua dalam kerja, dan anak-anak yang “ditinggalkan” oleh orangtuanya agar tetap bisa bertahan hidup.

Foto-esai dari Dzul menceritakan bagaimana ekonomi pesisir berjalan melalui ritme patronase. Nelayan, tengkulak, dan bandar terikat dalam relasi rasa “pernah ditolong”. Rasa tersebut menjadi penahan untuk tetap bergerak dalam lingkaran patronase.

Terakhir, refleksi dari Zidan menggambarkan ruang yang kian menipis antara laut dan darat. Desa yang perlahan tenggelam bukan sekadar bencana ekologis, melainkan proses sosial yang terus bekerja. Pada akhirnya, “ruang” menjadi rapuh dan sementara.

Laut bukan sekadar sumber daya. Zine “Suara Laut” tengah mengangkat laut adalah ruang kehidupan dan kehilangan. Laut bukan hanya “ruang” produksi yang menggerakkan perekonomian nasional, tetapi ruang bagi harapan dan keterpisahan. Melalui suara dari pesisir, Zine “Suara Laut” mencoba membaca perekonomian kelautan nasional melalui sudut yang paling manusiawi, yaitu menghidupi sekaligus menghilangkan.

Untuk menutupnya, saya mengutip lagu dari Bon Jovi berjudul *Livin' on a Prayer* yang mengisahkan kehidupan kelas pekerja,

Tommy used to work on the docks,
union's been on strike
He's down on his luck, it's tough, so tough
Gina works the diner all day, working for her man
She brings home her pay, for love, mmm, for love
She says, “We've gotta hold on to what we've got
It doesn't make a difference if we make it or not
We've got each other and that's a lot for love
We'll give it a shot”

Lal Salam,
Penginterupsi



Foto: Fai / DFW Indonesia

Selayang Pandang

Dari Data di Laut Hingga Kebijakan di Meja Rapat

Pernakah Anda mencoba menjelaskan konsep 'keberlanjutan ekosistem' kepada seseorang yang hari itu hanya ingin memastikan keluarganya bisa makan? Di situlah pekerjaan kami dimulai. Saya, sebagai *Program Director*, seringkali berada di tengah-tengah dua dunia tersebut: dunia idealis di mana laut harus lestari, dan dunia nyata di mana asap dapur harus tetap mengepul. Misi kami di **Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia** adalah menjadi jembatan antara keduanya, memastikan bahwa menjaga laut tidak berarti mengorbankan perut nelayan, perut pekerja yang ada di industri perikanan, dan sebaliknya. Ini adalah seni menyeimbangkan yang rumit, terkadang membuat frustrasi, tapi selalu kami kerjakan dengan semangat dan sepenuh hati.

Kami bukan cenayang yang bisa menebak masalah di lautan dari balik meja ber-AC. Setiap program kami lahir dari data yang solid, dari riset yang terkadang membuat kami harus berpanas-panasan di atas kapal, bermandikan keringat di lapangan atau begadang menganalisis angka dan hasil temuan. Kami memetakan zona rawan, menginvestigasi dampak sosial ekonomi dari praktik penangkapan yang merusak, dan mencoba memahami pola pikir setiap pemangku kepentingan. Anggap saja ini pekerjaan intelijen kami; tanpa peta 'pertempuran' yang akurat, strategi sebaik apa pun hanya akan menjadi angan-angan yang mahal.

Namun, data di atas kertas tidak akan mengubah apa pun jika hanya berakhir di laci meja atau bahkan di media penyimpanan digital. Di sinilah babak selanjutnya dimulai: advokasi kebijakan. Ini adalah bagian di mana kami mengetuk pintu-pintu para pengambil keputusan, berbekal laporan tebal dan segudang rekomendasi. Terkadang prosesnya terasa seperti maraton yang tak ada habisnya, membutuhkan kesabaran setebal kamus dan bercan-

gkir-cangkir kopi yang tak terhitung jumlahnya. Kami hadir bukan sebagai musuh, melainkan sebagai mitra kritis pemerintah yang membawa suara dan realitas dari lapangan, dengan sedikit humor sarkastik jika diperlukan untuk mencairkan suasana.

Tentu saja, solusi terbaik sering kali tidak datang dari menara gading di Jakarta, melainkan dari warung kopi di pesisir. Inilah mengapa pilar utama pekerjaan kami adalah pemberdayaan masyarakat. Kami duduk bersama para nelayan, para pekerja perikanan, para anak buah kapal, mendengar keluh kesah mereka—bukan sebagai objek program, tapi sebagai pakar sejati lautan. Dari obrolan panjang itulah lahir program-program pelatihan, pengenalan alat tangkap ramah lingkungan, pengenalan resiko kerja, pengenalan hak buruh, hingga penguatan kelembagaan lokal. Kami percaya, penjaga laut terbaik adalah mereka yang hidup dan matinya bergantung pada laut itu sendiri.

Jika dibayangkan, pekerjaan kami ini seperti merakit sebuah mesin mobil balap yang kompleks. Riset adalah cetak birunya, advokasi adalah pelumas yang memastikan roda birokrasi berputar, dan pemberdayaan serta penyadartahuan masyarakat adalah bahan bakar yang membuatnya terus berjalan. Keempat elemen ini tidak bisa dipisahkan. Tanpa riset, advokasi kami ompong. Tanpa advokasi, temuan kami menguap. Dan tanpa keterlibatan komunitas, semua perubahan hanya akan bersifat sementara dan dangkal. Tugas kami adalah memastikan semua komponen ini terpasang dengan pas dan bekerja secara harmonis.

Pada akhirnya, apa yang kami impikan? Sederhana saja: laut yang sehat, nelayan dan pekerja perikanan yang berdaya, serta industri perikanan yang adil dan berkelanjutan. Sebuah visi yang mungkin terdengar terlalu megah, namun setiap langkah kecil yang kami ambil di lapangan membawa kami lebih dekat ke sana. Kami tidak memegang semua jawaban, tapi kami selalu punya kursi tambahan dan kopi panas untuk siapa saja yang mau ikut berpikir dan bekerja bersama kami. Karena masalah sebesar ini jelas tidak bisa diselesaikan sendirian.



Imam Trihatmadja
Direktur Program DFW Indonesia



Ingat

Keluarga menunggu dirumah. Tolak bekerja jika keselamatan tidak dijamin.

Okay

Kalau kamu merasa terancam, yuk kontak kita:
0811-9214-141 & 0811-1437-575
nfc.or.id

PS. Seluruh layanan NFC Indonesia tidak dipungut biaya apapun.

ESAI

Pada Awalnya, Secercah Harapan di Samudera Hindia

(Kisah Perjuangan Awak Kapal Penangkap Tuna)

Laode Hardiani,
Senior Field Facilitator, DFW Indonesia

Foto: Fai/ DFW Indonesia

Putra (bukan nama sebenarnya), seorang pria berumur 34 tahun berasal dari Pandeglang, Banten, sudah bekerja lebih dari sepuluh bulan menjadi Awak Kapal Perikanan (AKP) milik PT Bandar Harapan di Pelabuhan Benoa, Bali. Putra memutuskan menjadi AKP karena ia merasa kehidupan di kampung halaman terasa berat dengan peluang kerja terbatas, penghasilan tak tentu, dan masa depan yang suram. Putra ingin mengubah nasib dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Di tengah usaha mencari pekerjaan, Putra menemukan informasi lowongan pekerjaan di Facebook. Iklan tersebut sepintas terlihat menarik karena menawarkan posisi sebagai AKP dengan janji gaji besar dan fasilitas yang memadai. Awalnya, ia ragu, tetapi desakan ekonomi mendesak Putra untuk menghubungi nomor yang tertera dalam info lowongan tersebut. Nahasnya, ia tidak tahu jika informasi lowongan kerja tersebut berasal dari calo.

Ketika dihubungi oleh Putra, calo tersebut ramah dan meyakinkan. Penjelasan yang diberikan oleh calo mengenai proses rekrutmen, perjalanan berlayar, dan peluang penghasilan membawa Putra percaya dengan ajakan calo. Putra juga dijanjikan pelatihan singkat sebelum keberangkatan serta pengurusan dokumen resmi yang diperlukan. Calo seperti membawa harapan bagi Putra. Meski terdapat keraguan, pada akhirnya Putra memutuskan untuk mengikuti proses rekrutmen tersebut sembari berharap mendapatkan pekerjaan yang layak.

Setelah sepakat dengan calo rekrutmen, Putra diberi tahu bahwa akomodasi perjalanan dari Banten ke Benoa sudah diatur oleh calo tersebut. Semua tiket dan transportasi telah disiapkan, sehingga ia tinggal mengikuti arahan calo tersebut. Perjalanan dari Banten ke Benoa memakan waktu cukup lama, tetapi Putra terus membayangkan kehidupan baru yang

menanti di pelabuhan, dan itu memberinya semangat. Sesampainya di Benoa, Putra dan beberapa calon ABK lainnya tidak langsung naik kapal. Mereka ditampung di sebuah rumah yang sudah disiapkan oleh calo rekrutmen. Rumah itu cukup sederhana, tetapi lumayan cukup sebagai tempat singgah sementara. Selama beberapa hari di sana, Putra mulai mengenal sesama awak kapal dan berbagi cerita serta harapan.

Setelah beberapa hari menunggu di rumah penampungan yang disiapkan calo, akhirnya Putra ditempatkan di kapal milik PT. Bandar Harapan. Di perusahaan itu, Putra ditempatkan di kapal penangkapan tuna. Namun, pada akhirnya, Putra dihadapkan pada kenyataan yang tidak sesuai dengan janji calo. Janji akomodasi gratis, menjadi utang. Bahkan, semua biaya pelatihan dan dokumen keberangkatan ditagih melalui sistem kasbon. Putra sudah terjebak dalam modus jeratan hutang bahkan sebelum berlayar.

Menuju Laut Lepas

Suara mesin kapal mulai menderu ketika kapal, KM Bandar Nelayan, perlahan meninggalkan dermaga Pelabuhan Benoa. Di buritan kapal, beberapa dari ABK masih sempat menelepon keluarga untuk sekadar menyampaikan kabar bahwa mereka telah dalam perjalanan menuju perairan Samudra Hindia. Kapal bertolak ke selatan, menuju *fishing ground* di Samudera Hindia. Jarak tempuhnya sekitar 600-800 mil laut dari Bali, bisa memakan waktu 10 sampai 15 hari pelayaran, tergantung cuaca dan arus.

Perjalanan panjang ini tidak semua awak terbiasa. Beberapa pemula, termasuk Putra, mabuk laut, wajah pucat, tak sanggup makan. Dalam perjalanan, Kapten sering kali memberikan pengarahan tegas. "Target kita jelas: tuna sirip kuning dan *bluefin*. Kita kerja cepat, efisien, dan fokus. Tidak ada tempat untuk kesalahan. Kalau hasil bagus, kalian bakal terima bagian lebih. Harga tuna sekarang tinggi. Percaya sama saya," ungkap Putra sembari menirukan perkataan kapten.



Satu per satu ABK mulai bertugas: mengecek alat *longline*, memperbaiki pelampung, mengikat umpan, dan memastikan mesin kapal berjalan normal. Ini adalah fase persiapan sebelum benar-benar masuk ke wilayah penangkapan yang ditandai dengan koordinat di GPS kapal -tempat di mana arus laut, suhu air, dan migrasi ikan bertemu. Di tengah laut, Putra bersama teman-temannya harus berjibaku dengan ombak yang sewaktu-waktu berubah. "Di laut, tidak ada yang pasti. Kami harus terus maju," kata Putra.

Setelah beberapa hari perjalanan menyusuri laut lepas dari Pelabuhan Benoa, akhirnya kapal yang membawa Putra bersama 30 ABK lainnya tiba di lokasi *fishing ground* di Laut Selatan, bagian dari bentangan luas Samudra Hindia yang terkenal sebagai wilayah migrasi tuna sirip kuning dan tuna sirip biru. Di lokasi *fishing ground*, Putra bersama teman-temannya mulai bekerja dengan peralatan *longline* dan umpan segar yang sebelumnya telah disiapkan.

Ketika di lokasi tersebut, Kapten memberi aba-aba tegas, "Semua bersiap! Ini titik pertama. Kita mulai beroperasi hari ini". ABK yang bekerja mulai menurunkan tali panjang berisi ratusan mata kail ke laut. Setiap orang memiliki tugas masing-masing, mulai dari menyiapkan umpan, menjaga jalur tali, dan memantau kondisi laut serta cuaca. Bahkan, mereka tidak memiliki waktu untuk memikirkan rasa lelah akibat perjalanan panjang.

Malam pertama di *fishing ground* terasa panjang. Di tengah gelap dan sunyinya samudra, hanya suara mesin dan ombak yang menemani Putra dan teman-temannya. Namun, mereka seakan membawa harapan, setiap ikan yang naik ke dek kapal adalah harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Ketika pagi menyingsing, satu per satu pancing diangkat. Beberapa kali, mereka menemukan tuna seberat 80 kilogram. Bagi mereka, setiap ekor tuna adalah hasil kerja keras dan membawa pengharapan bagi keluarga di rumah.

Selama 11 bulan penuh, hidup Putra hanya berputar di atas kapal. Setiap hari nyaris tak ada bedanya. Bangun sebelum matahari terbit, bersiap dengan cepat, lalu mulai aktivitas penangkapan ikan. Malam hari pun tak selalu jadi waktu istirahat -karena kadang Putra harus kerja lembur menarik tali pancing, membersihkan dek, atau menurunkan hasil tangkapan ke ruang pendingin. Tak ada hari libur, tak ada jam kerja tetap. Yang ada hanya kapten yang terus menekan, ombak yang terus bergulung, dan tubuh yang semakin lelah.

Putra merasa rasa rindu terhadap keluarga di tengah-tengah laut. Namun, tidak ada sinyal di tengah Samudra Hindia. Kadang, saat malam tiba dan pekerjaan selesai, Putra duduk sebentar di belakang kapal. Menatap bintang dan memikirkan: "Apakah keluarga di rumah tahu aku masih hidup?" Sepuluh bulan seperti itu -keras, sunyi, dan penuh tekanan. Tapi mereka terus bertahan, karena satu hal: harapan. Harapan bahwa semua ini akan membawa perubahan. Harapan bahwa suatu hari, saat kapal kembali ke pelabuhan, hidup mereka juga akan ikut berlabuh ke tempat yang lebih baik.

Kerja, Kerja, Kerja

Putra setiap hari bekerja dari 16 hingga 20 jam. Waktu tidur hanya di sela-sela waktu tersebut. Bahkan, ketika lelah, Putra dan teman-temannya tetap dipaksa untuk bekerja. Tidak ada waktu istirahat yang berarti. Bahkan, ketika ada yang mengeluh, jawaban yang dilontarkan selalu sama, "kalau nggak kuat, silakan pulang!" kalimat tersebut sering dilontarkan disertai dengan bentakan. Terkadang mereka juga diancam tidak dibayarkan penuh atau dikirim pulang tanpa apa-apa. Di kapal, Putra dan teman-temannya makan seadanya, tidur di ruangan sempit. Ia merasa hidup seperti dalam kurungan. Mereka tidak bebas bicara, tidak bebas berhenti dari pekerjaan, bahkan tidak tahu kapan pulang. Mereka yang dianggap pembangkang, namanya dicatat dan diancam tidak mendapatkan bonus/premi hasil tangkapan.



Foto: Fai/ DFW Indonesia

Di atas kapal, Putra nyaris pingsan karena kelelahan. Tidak hanya Putra, teman-temannya juga mengalami hal yang sama. Tidak ada yang berani mengeluh. Kapten hanya fokus terhadap seberapa banyak ikan yang ditangkap. Putra pun sempat bertanya dalam hati, apakah nyawanya dan teman-temannya hanya menjadi alat demi tuna. Semua kondisi kerja yang dialami, hanya untuk memastikan kualitas tuna yang ditangkap tetap sehat.

Bahkan, ketika sakit mulai terasa di badan, mereka mencoba bertahan. Kapten hanya memandangi dan memberikan beberapa butir obat biasa tanpa resep. "Minum ini saja. Kalau masih sakit, kamu harus kuat. Ini laut, bukan rumah sakit," kata Putra sembari menirukan ucapan kapten. Tidak ada pemeriksaan medis lebih lanjut, karena tidak ada tenaga kesehatan di kapal.

Selain ketiadaan fasilitas kesehatan yang memadai, Putra bekerja tanpa perlindungan sosial. Tidak ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan juga asuransi kecelakaan kerja. Tiap hari, AKP berhadapan dengan ombak besar, alat berat, mata kail tajam, dan mesin-mesin yang bisa melukai tubuh. "Kami adalah manusia yang punya hak untuk bekerja dengan aman," tutur Putra.

Tak Ada Sinyal Di Laut Lepas

"Ponsel kami hanya jadi benda mati. Tidak bisa digunakan," kata Putra. Di tengah laut yang tidak ada sinyal bahkan satu bar, Putra selalu bertanya dalam hati tentang kabar anak dan istrinya yang ada di rumah. Apalagi, anaknya baru saja masuk sekolah dasar dan istrinya sedang mengandung. Ketiadaan jaringan seluler, membuatnya terputus dari daratan. Satu-satunya alat komunikasi, hanyalah radio di kapal. Radio itu hanya bisa digunakan oleh kapten untuk melapor ke pemilik kapal atau komunikasi ke sesama kapal di jalur tangkap.

Terakhir kali ia menanyakan kabar sebelum berangkat melalui ponselnya, istrinya mengeluh karena anaknya sedang demam. Namun, setelah di laut lepas, pesan pendek sekalipun tidak bisa terkirim. Tidak hanya Putra yang mengalami rasa kerinduan. Mereka semua mengalami hal yang sama. Di laut, yang paling berat menjadi AKP bukan hanya menantang badai, tetapi juga melawan rasa rindu.

Bersambung.....



Foto: Dzulfiusi Rafif/ DFW Indonesia



Foto: Dzulfiusi Rafif/ DFW Indonesia



Foto: Dzulfiusi Rafif/ DFW Indonesia

ESAI

Di Balik Setiap Nelayan Hebat, Ada Perempuan dengan Beban Ganda

Nabiyya Perennia,
Koordinator Program, DFW-Indonesia

Antara pukul 08.00 pagi sampai 16.00 sore, udara di Wonokerto, Pekalongan dipenuhi aroma khas malam yang meleleh - aroma khas getah damar. Malam, campuran parafin dan lilin tawon, bukan sekadar bahan pembuat batik, tetapi penyangga kehidupan perempuan-perempuan di Pekalongan. Sering kali, para buruh ini adalah istri nelayan migran. Para perempuan itu bekerja untuk menghidupi keluarganya selama suami mereka pergi berlayar.

Kabupaten Wonokerto dianggap sebagai sarang nelayan migran, buruh yang bekerja di kapal penangkap ikan besar menangkap tuna dan komoditas ekspor berharga lainnya di lautan lepas. Bekerja sebagai nelayan migran sangat berat. Kontrak kerja berlangsung 8-14 bulan tergantung jenis kapal, dengan upah rendah dan jam kerja panjang. Mereka bekerja sekitar 12 jam per hari dengan aktivitas fisik di atas kapal yang melelahkan. Berkaitan dengan kondisi di atas kapal, Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia telah mendokumentasikan hal-hal tersebut. Beberapa pelabuhan besar di Indonesia, seperti Muara Baru, Benoa, Bitung, dan Dobo telah kami singgahi. Namun, setelah melihat kondisi di pelabuhan, kami mulai bertanya, "bagaimana dengan keluarga mereka di kampung halaman?"

Nelayan migran direkrut oleh tekong, pelaut yang memiliki pangkat atau nomo yang tinggi, melalui proses rekrutmen. Di Wonokerto, tekong biasanya akan merekrut kerabat atau tetangga mereka. Nelayan diberi kompensasi atau kasbon sekali saja sebelum berangkat ke pelabuhan, biasanya Rp8-10 juta (500-600 USD), setengahnya diberikan kepada keluarga mereka.

Alhasil, keluarga hanya ditinggal 3-5 juta selama satu tahun mereka menjalani kontrak di laut. UMR Pekalongan pada tahun 2025 adalah Rp2.486.653,59 –tentu saja jumlah yang mereka dapatkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan kontrak kerja yang panjang, istri mereka menjadi *single mother* secara musiman, menanggung beban produksi dan reproduksi bagi keluarga mereka.

Tingkat pendidikan di Wonokerto rendah, dengan rata-rata 7 tahun sekolah –hanya sampai bangku SMP. Akibatnya, orang hanya dapat bekerja di sektor informal, biasanya sebagai buruh harian. Perempuan umumnya bekerja sebagai buruh batik atau penjahit. Buruh batik bekerja selama 8 jam sehari. Membuat batik merupakan proses yang panjang, terdiri dari berbagai tahapan untuk menghasilkan hanya satu lembar. Dimulai dengan membuat sketsa, mencanting (menutupi sketsa dengan malam), dan beberapa tahap pewarnaan. Para buruh ditugaskan pada tahap mencanting, kemampuan yang sudah mereka kembangkan sejak usia yang belia.

Dibutuhkan total satu bulan untuk menyelesaikan satu lembar. Meskipun karya-karya ini sangat dihargai, mencapai Rp2 juta per potong, perempuan-perempuan ini tidak begitu dihargai. Paling banyak, buruh batik mendapatkan Rp40 ribu sehari, atau di bawah Rp1 juta per bulan. Penjahit mendapatkan upah yang sama, seringkali mengambil komisi atau sanggah beberapa kode (satu unit berarti 20 potong) per minggu, menjahit daster atau celana. Mereka mendapatkan Rp60 ribu per kode. Kesamaan kedua buruh ini, selain bekerja di industri tekstil, adalah cara mereka bekerja. Ketika ditanya mengapa para perempuan ini tidak bekerja di pabrik dengan potensi gaji yang lebih tinggi, mereka menjawab dengan lugas:

“**Kalau saya tidak di rumah, siapa yang akan mengurus anak-anak?**”





Foto:Yani/ DFW Indonesia

Para buruh batik dan penjahit seringkali bekerja dari rumah. Mereka diberi bahan mentah oleh atasan dan menghasilkan produk jadi. Terkadang, mereka juga menanggung biaya produksi, seperti bahan bakar yang dibutuhkan untuk melelehkan malam atau biaya listrik mesin jahit yang tinggi. Mereka menghabiskan banyak sekali waktu dan biaya untuk menyeimbangkan tugas mengasuh anak dan mencari nafkah, seringkali bekerja 12 jam sehari. Akhirnya, pengorbanan perlu dilakukan, dan anak-anak mereka yang terkena dampaknya.

Ibu N, seorang perangkat desa yang juga bekerja sebagai guru di PAUD desa, menyampaikan kekhawatiran tentang murid-muridnya. Cukup banyak anak yang mengalami keterlambatan bicara. Akibat ketidakhadiran ayah dan padatnya kerja ibu, anak-anak di Wonokerto kekurangan perhatian intensif yang dibutuhkan sejak usia dini yang berdampak pada perkembangan anak. Ibu I bercerita tentang keponakannya yang autis yang tidak bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) karena daftar tunggu sudah terlalu penuh.

Kurangnya perhatian berdampak pada masa depan anak-anak ini, karena angka putus sekolah dan pernikahan dini masih tinggi. Akibatnya, banyak yang tidak dapat bekerja di sektor formal, beralih ke perikanan dan membuat batik, sehingga siklus keluarga nelayan terus berulang.

Perempuan Wonokerto tidak bisa sepenuhnya disalahkan, karena tidak mendapatkan dukungan dari manapun. Syukur-syukur, mereka tinggal bersama keluarga besar dan dapat bantuan di proses pengasuhan. Namun, tidak semua orang demikian. Ketika kami mengundang Ibu T ke komunitas peduli sosial kami, sebagai perwakilan dari RT, ia sedang hamil 7 bulan. Suaminya bekerja sebagai nelayan di Bitung, Sulawesi Utara; sehingga mereka hubungan jarak jauh. Karena beliau di trimester akhir, dia sudah tidak bekerja. Selain itu, kondisinya membutuhkan pemeriksaan dan konsultasi rutin. Ia menghadapi cobaan ini sendirian, dengan bantuan sesekali dari tetangga, sambil membesarkan anak satunya yang duduk di bangku SMP.

Kondisi nelayan migran menunjukkan masih ada celah dalam dukungan negara terhadap pekerja. Karena mereka bukan pekerja migran yang bepergian ke luar negeri, mereka tidak terwakili oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), karena baik mereka maupun terkadang atasan mereka bekerja di dalam negeri. Padahal sudah jelas kondisi rentan mereka dan keluarga mereka. Dukungan bagi perempuan dan keluarga sangat dibutuhkan di bidang ini, tidak hanya dalam aspek produksi tetapi juga reproduksi. Ibu N yang disebutkan di atas, meskipun bergelar sarjana,, hanya menerima gaji Rp100.000 per bulan per anak di tempat penitipan anak desa. Uang sejumlah Rp100.000 saja sudah sangat berat bagi ibu-ibu Wonokerto. Mereka sudah memproduksi aset kultural Indonesia dan sekaligus membesarkan masa depan negara. Negara pun perlu mengambil tanggung jawab atas rakyatnya. Selama perempuan Wonokerto tidak dapat upah yang layak atau dukungan bagi pengasuhan, mereka akan terus menanggung beban ganda ini.



#LAWANUNIONBUSTING

FOTO-ESAI

Foto: Dzulfiusi Rafif/ DFW Indonesia

Ombak Muara di Kongsi Utara: Visualisasi kondisi sosial-ekonomi di TPI Wonokerto

Dzulfiusi Rafif
Fasilitator Lapangan, DFW-Indonesia

Potret-potret ini berupaya untuk menggambarkan sekelumit kondisi aktivitas dan aktor di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Hadirnya TPI sebagai pasar hasil tangkapan nelayan tradisional, tidak dapat dipisahkan dengan hadirnya agen-agen yang hadir di dalamnya seperti koperasi TPI, tengkulak, dan perpanjangan tangganya dalam balutan seperangkat aturan mainnya.

Tentang semua potret yang diambil di TPI Wonokerto, saya yakin bahwa potret-potret yang diambil belum mampu untuk 'menjelaskan dirinya sendiri', sehingga teks dirasa perlu dihadirkan guna membaca konteks visual secara memadai. Dengan demikian, adanya potret dan teks dalam tulisan ini berusaha untuk dapat memperjelas pembacaan konteks kondisi, relasi, dan keterkaitan di dalam dan/atau diantara potret.



Foto: Dzulfiusi Rafif / DFW Indonesia

Dingin angin laut belum hilang dari baju-baju tipis pemberian toko material atau acara-acara desa yang mereka kenakan sejak dini hari dari rumah. Dari mulut muara hingga ke dermaga kapal, salah satu akan sibuk memilah ikan, salah satu mengarahkan kemudi kapal. Kemudian, mereka akan berkumpul dan saling bantu memilah ikan-ikan dalam penampung ketika kapal sudah terparkir sempurna di samping dermaga atau kapal-kapal lainnya.

Di TPI/ kongsi, teri dan cumi segar para nelayan sudah disambut oleh bakul-bakul (pedagang) kecil dari pasar di desa sebelah, cucuk atau perpanjangan tangan tengkulak besar, dan bandar besar siap kirim keluar kota ke Semarang. TPI Wonokerto saat ini mengharuskan setiap bakul, tengkulak, maupun bandar membayar pajak lelang atau beli langsung kepada TPI sebesar 2% per total lelang. Aturan ini memang baru dibuat dan diberlakukan oleh kepengurusan koperasi TPI yang baru dengan tujuan meminimalisir kerugian akibat tengkulak hingga bandar dan sentral kontrol perekonomian nelayan di Kecamatan Wonokerto.



Foto: Dzulfiusi Rafif / DFW Indonesia

Tidak jarang wajah-wajah lama sang langgan (tengkulak menengah) yang dulu memberi uang guna keperluan perlengkapan kapal mereka langsung menghampiri ke kapal dan membeli langsung tanpa pelelangan. Beberapa nelayan yang masih terikat dengan sang langgan ini akan langsung menyerahkan ikan dengan harga yang lebih rendah dari pasaran ataupun lelang melalui tawar menawar. Banyak dari para nelayan yang masih terikat oleh langgan-nya kerap menitik beratkan pada rasa 'pernah ditolong' yang menghasilkan patronase semu. Meskipun pada akhirnya nelayan-nelayan itu akan mengatakan "*tuku iwak sak penak boyoke dewek!* (beli ikan seenaknya saja)".



Foto: Dzulfiusi Rafif / DFW Indonesia

Sekeranjang teri dan seember cumi digotong dari kapal ke dermaga. Keranjang teri satu per satu di timbang dan mulai diampar di lantai dari embernya. Juru lelang bernada cepat dengan *microphone* dan tongkatnya berkeliling menunjuk satu persatu hasil tangkapan para nelayan. Bila beruntung di beli oleh bandar sotong besar dari desa sebelah, para nelayan bisa mendapat Rp 80.000/ kg, sedangkan teri nasi dapat laku Rp 50.000/kg. Tapi nampaknya keberuntungan mereka tidak berlaku setiap hari.





Hamparan alas jaring penjemur ikan teri berjajar di sepanjang jalan sekitar TPI Wonokerto. Para perempuan yang kebanyakan istri dan anak nelayan sekitar TPI akan saling bantu menggotong keranjang teri hingga memilah ikan-ikan jemuran mereka. Pengolah ikan asin maupun teri kering berbasis rumahan ini memang menjadi sumber pendapatan utama bagi perempuan di keluarga nelayan. Mereka betul-betul mengandalkan kerjanya dari suplai ikan teri dan ikan-ikan berukuran kecil maupun sedang lainnya dari TPI juga cuaca.

Kendati suami para pengolah ikan asin adalah nelayan dengan target tangkapan utama seperti ikan teri, mereka tidak bisa menerima langsung tangkapan suami mereka untuk diolah menjadi ikan asin atau ikan kering. Alasan utamanya adalah kebutuhan akan perputaran uang cepat guna modal solar untuk melaut besok. Di sisi lain, masuknya istri nelayan pengolah ikan asin dalam kategori bakul di mata petugas TPI membuat mereka harus melalui perantara TPI dan bersaing dengan tengkulak atau bandar guna memperebutkan hasil tangkapan suaminya.

Para pengolah ikan asin rumahan akan menjemur hasil pembeliannya di pinggir jalan selama sehari penuh sebelum akhirnya dipilah dan dibersihkan dari campuran udang maupun ikan lainnya. Setiap harinya, petugas perikanan dan dermaga setempat akan memungut Rp5.000/keranjang/hari kepada para pengelola ikan asin dan teri yang menjemur di sepanjang jalanan umum menuju kantornya, meskipun jalanan itu merupakan fasilitas publik. Para petugas perikanan dan dermaga setempat juga menyewakan lahan lapang dekat TPI untuk menjemur ikan kepada warga dengan sewa Rp500.000/ bulan.



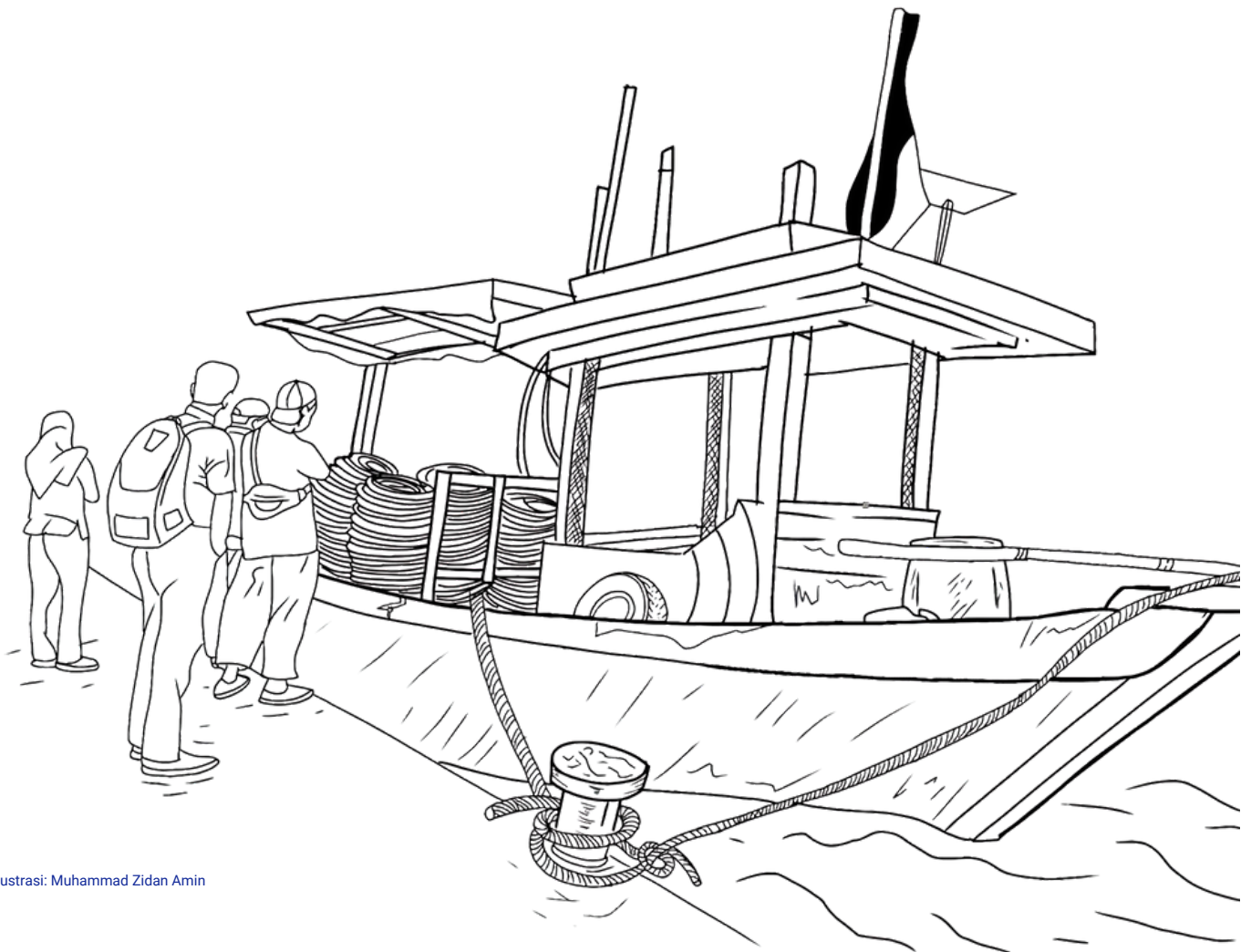
ESAI

Desa yang Hilang

Muhammad Zidan Amin,
Warga Desa Wonokerto, Pekalongan

Dahulu di seberang desa kami, desa Simonet, yang saat ini dikosongkan akibat terendam air laut, berdiri dan ramai oleh penduduknya. Desa Simonet hidup dengan tenang, warganya akrab dengan laut, dan salah satu aksesnya adalah dengan menyeberangi sungai dan muara seberang TPI Wonokerto. Letaknya terpencil, seolah berdiri sendiri seperti pulau kecil yang dipeluk air di sekelilingnya. Namun seiring waktu, air laut terus naik dan tidak pernah surut. Sedikit demi sedikit, rumah-rumah di Simonet tenggelam. Tempat yang dahulu ramai kini sunyi, hanya gelombang yang datang dan pergi. Mungkin kini rumah-rumah itu telah menjadi tempat bagi ikan, bakau, dan tanaman laut tumbuh tanpa gangguan.

Dari jauh, bangunan-bangunan yang tersisa masih tampak, meski semakin hari semakin pudar. Terbesit dalam kepala tentang hari esok, bagaimana jika hal yang sama terjadi pada desa kami? Tempat kami dibesarkan, bermain, dan hidup sejak kecil. Mungkin suatu hari anak cucu hanya akan mengenal desa ini melalui cerita. Namun bagi kami, kenangan itu tidak akan pernah hilang. Desa ini akan tetap hidup di dalam ingatan orang-orang yang mencintainya.



Ilustrasi: Muhammad Zidan Amin

Syukur yang Hati-Hati

Setiap hari, langit yang masih redup menyambut para nelayan yang berangkat dengan doa dan keberanian. Hembusan angin membawa aroma garam laut yang melekat pada kulit dan pakaian, seolah menjadi penanda bahwa hidup mereka selalu bertaut dengan ombak. Hangatnya kehidupan pesisir diwarnai tawa anak-anak yang berlarian di tempat pelelangan ikan. Deru perahu yang kembali kerap membawa harapan bagi orang-orang mereka tinggalkan di rumah.

Kecemasan kerap hadir tanpa diundang. Perlahan, permukaan air laut mulai naik seiring perubahan arah angin. Laut, sebagaimana api, dapat menjadi sahabat ketika tenang dan menjadi lawan ketika murka. Kami masyarakat pesisir belajar, bahwa setiap hari harus berjalan dengan rasa syukur yang hati-hati, menjaga harapan sambil tetap waspada menghadapi kemungkinan alam yang mulai sulit diperkirakan.



Foto:DFW Indonesia, SBMI, Greenpeace Indonesia

BERITA KELAUTAN

DFW, SBMI dan Greenpeace Indonesia Desak Akuntabilitas Polri: Adukan Penanganan Kasus TPPO Run Zeng 03 yang Berlarut ke Kopolnas dan Itwasum

Jakarta, 21 Oktober 2025 - Kuasa Hukum Korban Kapal Run Zeng 03 dari Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), dan Greenpeace Indonesia mengadukan Penyidik Bareskrim Polri kepada Komisi Kepolisian Nasional Indonesia (Kopolnas) dan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Profesi berupa proses penyelidikan dan penyidikan yang berlarut-larut/Undue Delay. Pengaduan ini dilayangkan kuasa hukum korban karena diduga telah terjadi proses penyelidikan dan penyidikan yang berlarut-larut atas dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terjadi di atas kapal perikanan KM Mitra Usaha Semesta (KM MUS) dan Kapal Run Zeng (RZ) 03. Kasus ini sebelumnya telah dilaporkan ke Bareskrim Polri sejak Juni 2024 dengan nomor Laporan Polisi: STTL/206/VI/2024/BARESKRIM.

Pihak-pihak yang dilaporkan yaitu MOP, R, GW, AW, dkk (dan kawan-kawan), namun hingga kini proses hukum berjalan lambat. Perkembangan kasus pada

3 Maret 2024, Bareskrim Polri melimpahkan penanganan perkara kepada Kepolisian Daerah (Polda) Maluku dengan dalih bahwa proses sudah di tahap penyidikan, namun setelah ditelusuri proses di Polda Maluku masih di tahap penyelidikan. Kuasa hukum korban juga telah melakukan pengaduan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 25 September kemarin untuk mendorong Komnas HAM sebagai watchdog HAM independen, agar dapat bergerak dalam penanganan kasus ini.

Aduan ini dilakukan ke Kopolnas dan Itwasum untuk mendesak kedua lembaga untuk memeriksa, mengawasi dan memastikan akuntabilitas internal Polri dalam menanggapi situasi pada law enforcement kasus perdagangan orang ini. Kuasa Hukum Korban Kapal Run Zeng 03 menyampaikan bahwa Kopolnas dan Itwasum memiliki mandat untuk bisa memeriksa dan menindaklanjuti situasi yang terjadi hari ini dalam penanganan kasus dugaan TPPO yang terjadi di KM MUS dan Kapal Run Zeng 03.

Dios Lumban Gaol, Kuasa Hukum dari Korban Kapal Run Zeng 03 menyampaikan sudah lebih 1 tahun 3 bulan proses penanganan kasus yang dilakukan Bareskrim Polri tidak menunjukkan perkembangan.

“Kasus ini masih jalan di tempat pada tahap penyelidikan, padahal tindak kejahatan dan pelaku yang terlibat sudah jelas, kami tekankan Bareskrim Polri tidak serius menangani kasus ini. Dalam situasi seperti ini korban akhirnya menjadi korban kembali karena Aparat Penegak Hukum gagal memenuhi hak korban” ujarnya.

Dugaan ini dikuatkan dengan pelimpahan kasus dari Bareskrim Polri kepada Polda Maluku tanpa alasan yang jelas.

Disisi lain, Siti Wahyaton, Kuasa Hukum dari Korban Kapal Run Zeng 03 menyampaikan bahwa proses penyelidikan yang berlarut-larut dan cenderung lamban merupakan suatu bentuk penundaan keadilan.

“Kita tidak boleh membiarkan keadilan terus tertunda, karena penundaan keadilan adalah ketidakadilan itu sendiri. Itwasum dan Kopolnas memiliki mandat untuk mengawasi kinerja Polri, kami berharap kedua lembaga ini mampu benar-benar untuk menjamin keprofesionalan penyidik yang menangani kasus ini. Terlebih TPPO merupakan kejahatan kemanusiaan serius, jangan sampai korban kembali menjadi korban karena penundaan keadilan akibat ketidakprofesionalan penyidiknya,” pungkasnya.

Greenpeace Indonesia yang diwakili oleh Fildza Nabila selaku Juru Kampanye Laut menegaskan bahwa kasus kapal Run Zeng 03 menunjukkan bagaimana praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing) memiliki harga yang sangat mahal bagi kemanusiaan, yaitu perbudakan modern dan perdagangan orang.

“Ketika laut dijarah tanpa kendali, manusia pun ikut dieksploitasi di dalam rantai pasoknya. Karena itu, Greenpeace juga mendesak Polri, Kopolnas, dan Itwasum untuk memastikan penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berpihak pada korban, agar kejahatan kemanusiaan di laut tidak terus berulang di balik praktik industri perikanan yang merusak dan tidak berkeadilan,” ujarnya.

Untuk itu, Kuasa Hukum Korban Kapal Run Zeng 03 menuntut kepada Kopolnas dan Itwasum untuk bisa melakukan pemeriksaan dan/atau pemantauan atas pengaduan sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Profesi berupa proses penyelidikan dan penyidikan yang berlarut-larut/Undue Delay, memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang dibutuhkan serta melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan lain, dan menyampaikan pemberitahuan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat serta melakukan pemantauan tindak lanjut terkait kasus ini.



Riset DFW: Pekerja Pengolahan Makanan Hasil Laut Bekerja dalam Kerentanan

Jakarta, 19 September 2025 — Dalam empat tahun terakhir, sektor perikanan telah berperan penting dalam mewujudkan visi ekonomi biru Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan ekspor produk perikanan Indonesia dari USD 4,56 miliar pada tahun 2021 menjadi USD 4,81 miliar pada periode Januari-Oktober 2024, atau meningkat rata-rata sekitar 1,8% per tahun. Peningkatan jumlah ekspor produk perikanan ini turut ditopang oleh pekerja di pabrik pengolahan makanan hasil laut juga berperan penting dalam rantai industri perikanan. Sejak tahun 2023, Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengimplementasikan program perlindungan pekerja perikanan di Jakarta, Bali, dan Sulawesi Utara.

Dalam mendukung upaya perlindungan pekerja perikanan, DFW Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan riset cepat terkait kondisi pekerja pengolahan tuna di Jakarta, Bali,

dan Sulawesi Utara sejak Mei 2025. Sebagai bagian dari proses menuju diseminasi, DFW Indonesia mengadakan Diskusi Hasil Riset: Kondisi Pekerja Pekerja Pengolahan Tuna di Bitung, Benoa, dan Jakarta Utara untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait permasalahan ini.

“Riset ini adalah salah satu bentuk upaya kami dalam dalam isu perlindungan pekerja perikanan, khususnya pekerja di pabrik pengolahan makanan hasil laut,” terang Imam Trihatmadja selaku Program Director DFW Indonesia.

Nabila Tauhida, Human Rights Officer DFW Indonesia menyebut pekerja pengolahan hasil makanan laut bekerja dengan fleksibilitas tinggi. Berdasarkan paparannya, fleksibilitas tersebut tercermin dalam kemudahan pekerja untuk berpindah kerja dari satu pabrik ke pabrik lainnya. Pola fleksibilitas tersebut didukung melalui kontrak kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berjangka pendek antara 3 bulan hingga 1 tahun.

“Penerapan kontrak jangka pendek dimaksudkan untuk mengikuti pola produksi yang berbasis pemesanan (pre-order),” terangnya.

Nabila juga memaparkan bahwa sektor pengolahan tuna dengan mode padat karya yang bergantung pada produksi berbasis pesanan membuat pekerja pengolahan makin rentan. Dalam riset yang dilaksanakan, terdapat salah satu perusahaan yang merumahkan pekerjaanya sekitar 60% pekerjaanya sebagai respons kebijakan Trump di awal 2025 lalu. “Pekerja yang kami temui dalam posisi rentan. Bahkan, terdapat pekerja yang terus menerus diperpanjang per triwulan PKWT selama 6 tahun,” pungkash Nabila. Sehingga, riset ini memberikan rekomendasi salah satunya untuk bisa melakukan penguatan pengawasan ketenagakerjaan utamanya berkaitan dengan penggunaan skema PKWT.

Selain itu, Nabila menemukan masih terbatasnya ruang representasi pekerja. Ia menyebut adanya “efek mendinginkan” di mana kekhawatiran kontrak tidak diperpanjang membuat pekerja enggan menyuarakan aspirasinya. Menurutnya, situasi ini tidak lepas dari kapasitas produksi yang sangat dipengaruhi fluktuasi permintaan pasar global.

“Pekerja lebih khawatir pada kepastian kontrak dibandingkan isu upah maupun keselamatan kerja. Bahkan, mereka cemas ketika stok ikan berkurang karena hal tersebut dapat memengaruhi keberlanjutan kontrak,” jelas Nabila.

Menanggapi paparan Nabila, Machmud selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) menuturkan kementerian saat ini telah berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja pengolahan melalui program maupun bimbingan teknis terhadap industri maupun pekerja. Menurutnya, tenaga kerja berperan penting dalam sistem produksi perikanan karena tenaga kerja merupakan tumpuan produktivitas usaha serta kualitas produk yang dihasilkan.

“Direktorat Jenderal PDSPKP siap berkolaborasi dengan para pihak dalam rangka meningkatkan kapasitas tenaga kerja sehingga dapat berkontribusi terhadap penguatan daya saing produk perikanan,” terang Machmud.

Selain itu, Yuli Adiratna, Direktur Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Ditjen Binwasnaker dan K3, Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan pentingnya tinjauan ulang terhadap undang-undang dan implementasi di lapangan. Menurutnya, berdasarkan UU Cipta Kerja, seorang pekerja hanya bisa diperpanjang masa kontraknya sebagai PKWT selama lima tahun.

“Setelah masa tersebut, pekerja menjadi pekerja dengan kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap,” jelas Yuli.

Benni Hasbiyalloh, Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina, menanggapi riset tersebut dengan melihat kondisi ketidakmenentuan pekerja pengolahan hasil makanan laut merupakan salah satu cara pengusaha untuk menekan biaya produksi. Benni yang turut melakukan riset serupa di bidang pekerja pengolahan hasil makanan laut menemukan bahwa pabrik tuna dapat bekerja selama 1 tahun penuh.

“Pola pekerjaan yang ditemukan dalam riset ini perlu diperdalam, karena akan berpengaruh pada proses rekrutmennya. Disisi lain, perlu juga diperhatikan apakah tuna merupakan suatu komoditas musiman atau tidak, apakah proses loin dan kaleng juga mempengaruhi apa tidak dalam perekrutan pekerja. Untuk itu, perlu untuk bisa membedah proses produksinya dulu karena ini akan berkaitan dengan bagaimana relasi kerja,” tutup Benni.



Foto: Fai/ DFW Indonesia



DFW Indonesia, 2025

Disclaimer: All outreach activities carried out by DFW Indonesia and its affiliated entities are free of charge.